

**DAMPAK PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP
PENINGKATAN HARGA DAN PRODUKSI
GABAH DI KABUPATEN ASAHAN**

TESIS



Oleh

DEDDY WAHYUDIN PURBA'S

NPM : 101802023

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER AGRIBISNIS
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

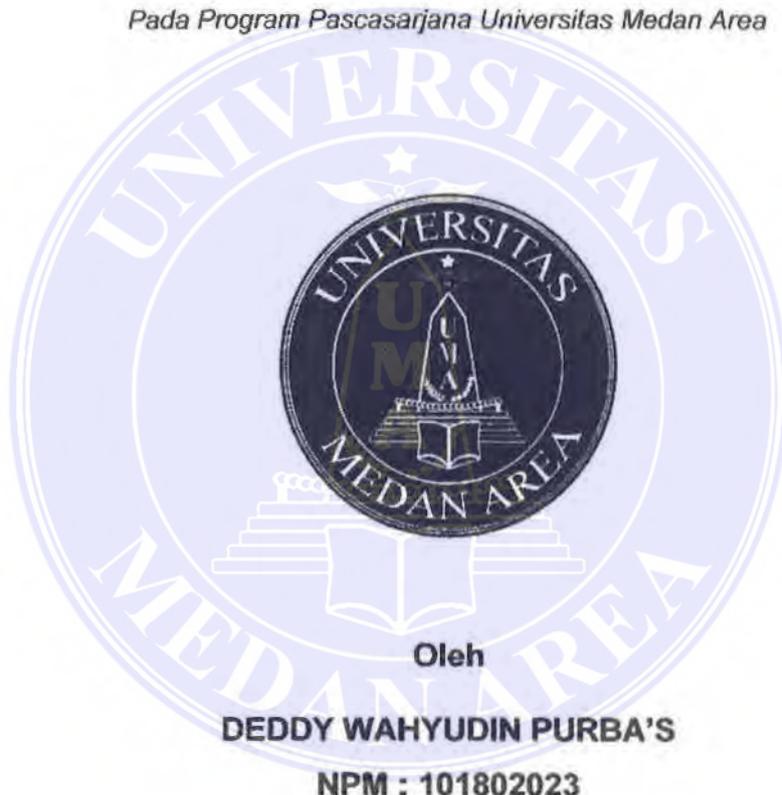
Document Accepted 9/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/3/23

DAMPAK PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP PENINGKATAN HARGA DAN PRODUKSI GABAH DI KABUPATEN ASAHAN

TESIS

*Untuk Memperoleh Gelar Magister Agribisnis (M.Si)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area*



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER AGRIBISNIS
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

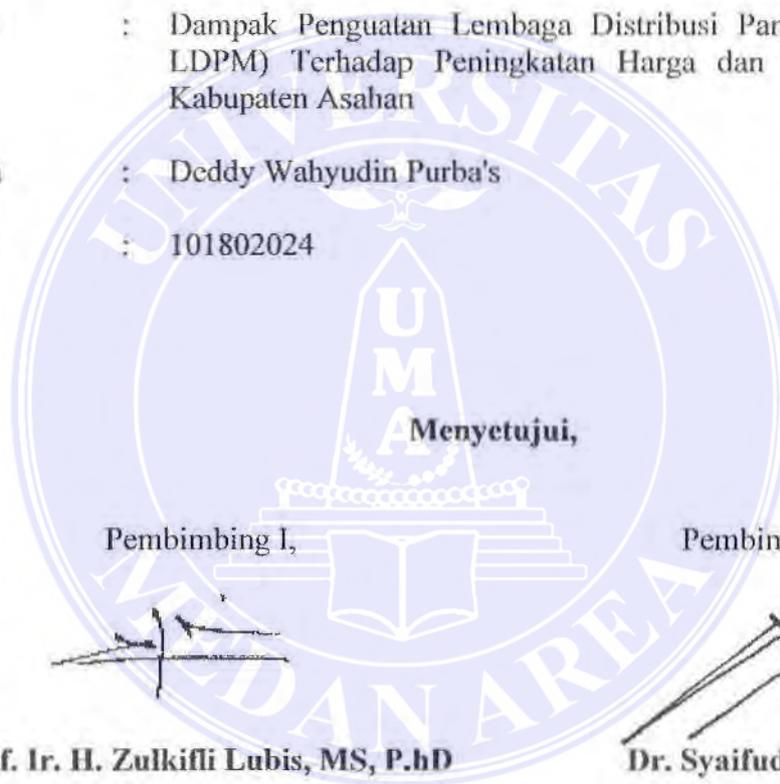
Document Accepted 9/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER AGRIBISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Dampak Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Terhadap Peningkatan Harga dan Produksi Gabah Di Kabupaten Asahan
Nama : Deddy Wahyudin Purba's
NPM : 101802024



Pembimbing I,

Prof. Ir. H. Zulkifli Lubis, MS, P.hD

Pembimbing II,

Dr. Syaifuddin, M.MA

Ketua Program Studi
Magister Agribisnis

Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

KATA PENGANTAR

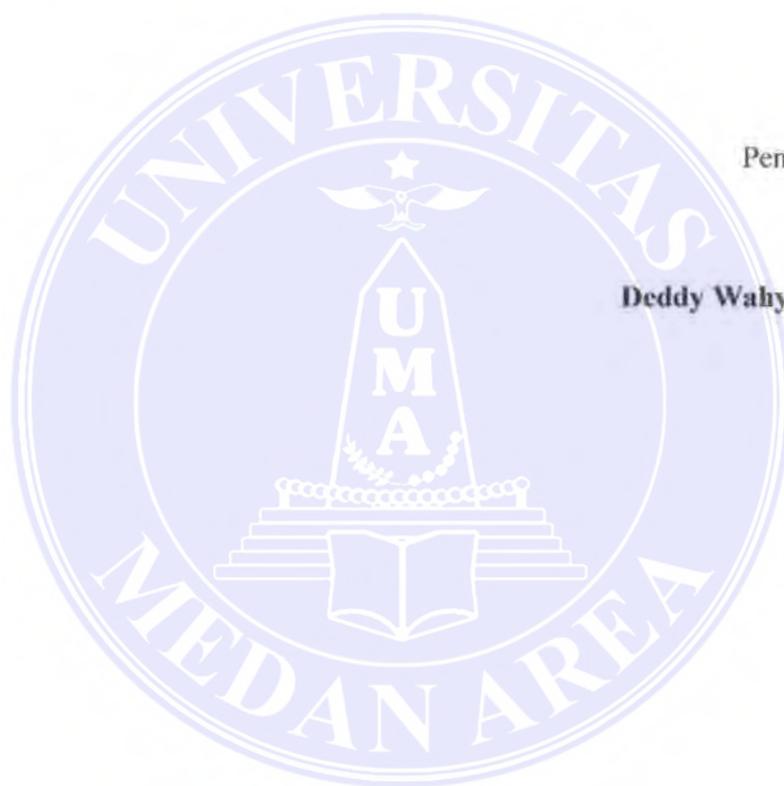
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini berjudul "*Dampak Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Terhadap Peningkatan Harga dan Produksi Gabah di Kabupaten Asahan*" dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada bapak-bapak Pembimbing dan Responden serta pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Ir. Zulkifli Lubis, M.App.Sc, P.hD MS selaku Pembimbing I dan Dr. Syaifuddin, M.MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan tesis ini.
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan yang telah memberikan izin serta dukungan kepada penulis untuk Tesis ini.
3. Staff Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan yang telah memberikan izin serta dukungan kepada penulis untuk Tesis ini.
4. Bapak – bapak dan Ibu responden yang telah membantu penyelesaian tesis ini.
5. Civitas akademika Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Pasca Sarjana MA –UMA.

Ucapan terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan kepada keluarga tercinta atas segala dukungan dan pengorbanannya selama penulis menempuh Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis Universitas Medan Area.

Disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan guna penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana yang diharapkan.



Penulis,

Deddy Wahyudin Purba's

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Hipotesis	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Pemberdayaan Petani	14
2.2. Kerangka Pemikiran	23
A. Kebijakan	24
B. Pendekatan	27
C. Strategi	29
III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2. Data dan Sumber Data	30

3.3. Metode Pengumpulan Data	31
3.4. Metode Penelitian	32
3.5. Metode Analisis	34
3.6. Defenisi Variabel Operasional Peneliti	36
IV. DESKRIPSI KEGIATAN P-LDPM	40
4.1. P-LDPM di Kabupaten Asahan	40
4.2. Sasaran Penerimaan P-LDPM	41
4.3. Kriteria dan Penentuan Calon Gapoktan	45
4.4. Tingkatan Organisasi P-LDPM	47
4.4.1. Tingkatan Gapoktan (penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan pasca mandiri).	48
4.4.2. Tingkatan unit usaha Gapoktan	48
4.4.3. Tingkatan petani	49
4.5. Indikator Keberhasilan	49
4.6. Pembiayaan dan Mekanisme Pencairan Dana	50
4.6.1 Pembiayaan	50
4.6.2. Mekanisme Pencairan Dana Bansos	51
4.7. Pemanfaatan Dana Bansos P-LDPM dan Sisa Hasil Usaha (SHU)	53
4.7.1. Pemanfaatan dana bansos P-LDPM	53
4.7.2. Pemanfaatan Sisa Hasil Usaha (SHU)	54
4.8. Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta pelaporan.	54
4.8.1. Pemantauan dan Evaluasi	54

4.8.2. Pengendalian dan Pengawasan	56
4.8.3. Pelaporan	56
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1. Karakteristik Desa Penelitian	58
5.1.1 Desa Punggulan	58
5.1.2. Desa Taman Sari	59
5.1.3. Desa Sei Silau Tua	60
5.1.4. Desa Meranti	60
5.2. Karakteristik Petani Responden	61
5.2.1. Status usahatani Padi Petani Responden	62
5.2.2. Usaha petani responden	63
5.2.3. Tingkat pendidikan	64
5.2.4. Status kepemilikan dan luas lahan	65
5.2.5. Pengalaman berusahatani petani responden ...	66
5.3. Karakteristik Gapoktan	67
5.4. Dampak P-LDPM terhadap peningkatan harga gabah	72
5.5. Dampak P-LDPM terhadap peningkatan produksi gabah	76
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	81
6.1. Kesimpulan	81
6.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Luas Panen, Produksi dan Rata – rata Produksi Padi Sawah + Padi Ladang menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009.	8
2.	Nama Gapoktan, Lokasi Gapoktan dan Tahapan Gapoktan Penerima Dana Penguatan – LDPM Kabupaten Asahan sejak tahun 2009 s/d 2011.	42
3.	Luas Panen, Produksi dan Rata – rata Produksi Padi Sawah + Padi Ladang Kabupaten Asahan Tahun 2008, 2009 dan Tahun 2010.	43
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan / Pekerjaan Masyarakat Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Tahun 2010.	58
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan / Pekerjaan Masyarakat Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Tahun 2010.	59
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan / Pekerjaan Masyarakat Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji Tahun 2010.	60
7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan / Pekerjaan Masyarakat Desa Meranti Kecamatan Meranti Tahun 2010. .	61
8.	Karakteristik Petani Responden Anggota P-LDPM Berdasarkan Status Mata Pencaharian Usahatani Padi	62
9.	Sebaran Petani Responden Menurut Golongan Umur	63
10.	Sebaran Responden Petani Padi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64
11.	Sebaran Petani Responden Berdasarkan Kriteria Luas Lahan Padi yang dimiliki Tahun 2009, 2010 dan 2011.	65
12.	Jumlah Petani Responden Berdasarkan Kriteria Pengalaman Berusahatani	66

13. Nilai Rata-rata Harga Gabah Sebelum dan Sesudah P-LDPM di Kabupaten Asahan	74
14. Nilai Standart Deviasi Rata – rata Produksi Gabah Sebelum dan Sesudah P-LDPM di Kabupaten Asahan	78



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pikir Kegiatan Penguatan – Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	25
2.	Diagram Peningkatan Harga Gabah Sebelum P–LDPM	73
3.	Diagram Peningkatan Harga Gabah Sesudah P–LDPM.	73
4.	Diagram Peningkatan Produksi Gabah Sebelum P–LDPM. ...	77
5.	Diagram Peningkatan Produksi Gabah Sesudah P–LDPM ...	77



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Tujuan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Kabupaten Asahan	86
2.	Peran Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	87
3.	Indikator Kinerja Peguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).	88
4.	Mekanisme Penyaluran Dana Gapoktan Kepada Unit Usaha Gapoktan	89
5.	Prosedur Pencairan Dana Untuk Tahap Penumbuhan dan Pengembangan.	91
6.	Struktur Organisasi Gapoktan Kecamatan Air Joman, Kecamatan Pulo Bandring, Kecamatan Meranti dan Kecamatan Setia Janji.	93
7.	Kondisi Sistem Pemasaran Gabah Sebelum dan Sesudah P-LDPM Disalurkan	95
8.	Hasil Analisis Perbedaan Rata-rata Harga Gabah Sebelum dan Sesudah Penguatan – LDPM Tahun 2007 dan 2010 di Kabupaten Asahan.	98
9.	Hasil Analisis Perbedaan Rata-rata Produksi Gabah Sebelum dan Sesudah Penguatan – LDPM Tahun 2007 dan 2010 di Kabupaten Asahan.	99
8.	Kuesioner	100

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu pemenuhan atas pangan menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan pangan dan gizi perlu diposisikan sebagai *central of development* bagi keseluruhan pencapaian target *Millenium Development Goal's* (MDGs) yang menjadi komitmen bersama (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

Permasalahan pangan dan gizi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan kompleks. Perkembangan lingkungan global seperti adanya global *climate change* dan meningkatnya harga minyak dunia telah mendorong kompetisi penggunaan hasil pertanian untuk pangan (*food*), bahan energy (*fuel*) dan pakan ternak (*feed*) yang makin tajam. Di samping itu, kecenderungan pengabaian terhadap *good agricultural practices* dan sumber pangan lokal (*biodiversity*) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan dan gizi nasional. Perkembangan ini memerlukan telaah dan respon kebijakan yang lebih menjamin terhadap pengamanan aksesibilitas pangan masyarakat (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Jakarta, 2008).

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu : (i) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu Negara berdaulat (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting sebagai indikator keberhasilan peningkatan ketahanan pangan, yaitu : (a) ketersediaan, yang berarti, pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) Distribusi, pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan serta prefrensinya (Saragih,B. 2010).

Berdasarkan data BPS, program yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini telah mampu menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia dimana secara *absolute* pada tahun 2011 menjadi sekitar 30 juta jiwa, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 31,02 juta

jiwa, yang pada umumnya sebagian besar dari penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian dari sektor pertanian yang memiliki skala usaha kecil yaitu kurang dari 0,5 hektar atau bahkan sebagai buruh tani (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani di daerah sentra produksi padi dan jagung, pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sejak tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), yaitu suatu upaya memberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok. Dalam rangka memperkuat permodalan dan membangun prasarana usaha penyimpanan, dialokasikan dana untuk Gapoktan sehingga mempunyai kemampuan modal kerja yang cukup, dapat mengembangkan usaha di bidang perdagangan pangan pokok, dan anggotanya yang kurang mampu memiliki akses terhadap pangan pokok (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

Sejalan dengan itu untuk mengatasi kelangkaan akses pangan pada saat menghadapi gagal panen ataupun paceklik, masyarakat wajib membangun cadangan pangan. Hal ini sejalan dengan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan (Pasal 48) yang menjelaskan, bahwa Pemerintah dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan untuk mencegah dan menanggulangi

gejolak harga pangan tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan. Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional pemerintah mengembangkan, membina, dan membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah di tingkat pedesaan, perkotaan, provinsi dan nasional.

Undang – undang tersebut telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2001 tentang Ketahanan Pangan (pasal 12 ayat 1 dan 2) yang menegaskan bahwa : (i) “ Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, dan atau paceklik yang berkepanjangan” dan (ii) “Pengendalian harga dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan dan pengaturan kelancaran distribusi pangan” (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

Untuk Negara Indonesia yang berpenduduk 220 juta jiwa, impor beras memiliki dampak jangka panjang amat buruk. Sedikit saja terjadi fluktuasi harga di pasar internasional bisa memukul ketahanan pangan nasional dan memunculkan masalah serius bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Masalah pengadaan pangan, khususnya beras sebaiknya didekati dari aspek kedaulatan pangan. Masalahnya tidak sebatas ketahanan pangan yang tidak memasalahkan pengadaan pangan bersumber dari impor, tetapi bagaimana memproduksi pangan secara mandiri. Kian gencarnya ancaman Negara – Negara maju kepada Negara

– Negara berkembang dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok penduduknya, kedaulatan pangan kian dibutuhkan untuk menegakkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka menentukan kebutuhan pangan rakyatnya (Sibuea. P, 2007).

Beras merupakan komoditi strategis di dalam kehidupan sosial ekonomi nasional, mengingat bahwa sekitar 95 % penduduk Indonesia konsumsi bahan pokoknya adalah beras, dan sekitar 21 juta rumah tangga petani bergantung pada sumber pendapatan usaha tani padi. Pada posisi yang strategis itu, gejolak atau instabilitas harga beras akan berdampak negatif terhadap usaha tani, kesejahteraan para petani dan buruh tani, serta para konsumen beras terutama kelompok miskin. Apabila kejadian ini berjalan terus menerus dari tahun ke tahun dikhawatirkan akan mengurangi semangat bagi para petani dalam berusaha tani padi yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan produksi sehingga produksi padi secara nasional akan stagnan atau bahkan menurun dengan pertambahan penduduk yang tinggi (Simatupang, P. 2000).

Menurut data dari FAO, dalam 20 tahun belakangan ini peningkatan produksi pangan di dunia rata – rata pertahun mencapai 2,1 %, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dunia hanya 1,6 % per tahun. Selama periode 2000 hingga 2015 peningkatan produksi pangan diperkirakan akan menurun menjadi rata – rata 1,6 % per tahun, namun

masih lebih tinggi jika dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk dunia yang diprediksi 1,2 % per tahun (Husodo, SY. 2002).

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa masih banyak petani yang menjual gabahnya di bawah harga pasar atau tidak wajar. Hal ini disebabkan antara lain kurang tumbuh dan berkembangnya suatu Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang berperan di dalam masalah pembelian gabah atau beras. Kondisi tersebut terjadi akibat kurangnya akses Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) terhadap dana untuk pengadaan gabah atau beras.

Sesuai dengan pola produksi tahunan, produksi gabah/beras pada saat panen raya di daerah sentra produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan gabah/beras bulanan relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harga jual gabah menurun pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi petani. sebaiknya pada musim paceklik sering kali kebutuhan beras umumnya melebihi produksi yang tersedia, sehingga menyebabkan harga gabah/beras menjadi meningkat. Kondisi ini menyebabkan harga gabah/beras berfluktuasi menurut musim.

Menurut Suryana, A. (2002), bagi Indonesia, karakteristik beras masih ada kendala utama di sisi produksi diantaranya, *Pertama*, rata – rata luas lahan yang dikuasai/miliki oleh petani hanya 0,3 ha. *Kedua*, sekitar 70 % dari jumlah petani padi (khususnya buruh tani dan petani skala kecil) termasuk dalam golongan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. *Ketiga*, sekitar 60 % dari jumlah petani padi

adalah konsumen neto beras. *Keempat*, rata – rata pendapatan rumah tangga petani padi yang bersumber dari usaha tani padi hanya sekitar 30 % dari total pendapatan keluarga. *Terakhir*, konsumsi beras perkapita penduduk Indonesia masih tergolong tinggi. Data sensus 1999 menunjukkan ketersediaan beras di tingkat RT masih sekitar 103 kg/kapita/tahun.

Beberapa sebab mengapa terjadinya rantai pemasaran hasil pertanian yang panjang dan produsen (petani) sering dirugikan diantaranya pasar yang tidak bekerja secara sempurna, lemahnya informasi pasar, lemahnya produsen (petani) memanfaatkan peluang pasar, lemahnya posisi produsen (petani) untuk melakukan penawaran untuk mendapatkan harga yang baik dan produsen (petani) melakukan usahatani tidak didasarkan pada permintaan pasar, melainkan karena usahatani yang diusahakan secara turun – temurun (Soekartawi, 2010).

Berdasarkan data statistik yang ada, saat ini sekitar 75 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Lebih dari 54 % diantaranya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan tingkat pendapatan yang relative rendah dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan, dan hampir 95 % nya menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Rata – rata Produksi Padi Sawah + Padi Ladang menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009.

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Luas Panen <i>Harvested Area</i> (Ha)	Produksi <i>Production</i> (Ton)	Rata-rata Produksi <i>Yield Rate</i> (Kw/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kabupaten/Regency</i>			
1. Nias	26 242	101 793	38,79
2. Mandailing Natal	36 609	170 573	46,59
3. Tapanuli Selatan	31 667	148 898	47,02
4. Tapanuli Tengah	30 873	129 372	41,90
5. Tapanuli Utara	25 505	109 748	43,03
6. Toba Samosir	20 060	91 639	45,68
7. Labuhan Batu	60 208	278 763	46,30
8. Asahan	19 139	88 391	46,18
9. Simalungun	97 832	464 702	47,50
10. Dairi	23 056	90 966	39,45
11. Karo	23 829	91 683	38,48
12. Deli Serdang	73 093	353 904	48,42
13. Langkat	86 512	407 334	47,08
14. Nias Selatan	13 941	53 734	38,54
15. Humbang Hasundutan	20 764	90 573	43,62
16. Pakpak Bharat	2 421	9 195	37,98
17. Samosir	7 141	32 543	45,57
18. Serdang Bedagai	72 263	357 172	49,43
19. Batu Bara	37 546	175 852	46,84
20. Padang Lawas Utara	19 947	94 475	47,36
21. Padang Lawas	18 101	85 281	47,11
22. Labuhan Batu Selatan	X	x	X
23. Labuhan Batu Utara	X	x	X
24. Nias Utara	X	x	X
25. Nias Barat	X	x	X
<i>Kota/City</i>			
71. Sibolga	-	-	-
72. Tanjung Balai	532	2 332	43,84
73. Pematang Siantar	3 591	17 125	47,69
74. Tebing Tinggi	1 146	5 330	46,51
75. Medan	3 941	18 305	46,45
76. Binjai	3 944	18 173	46,08
77. Padangsidimpuan	8 504	40 043	47,09
78. Gunung Sitoli	X	x	X
Jumlah/Total	768 407	3 527 899	45,91

Sumber/Source : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (2009)

Keterangan/Note : x) Masih bergabung dengan Kabupaten Induk/Included in Main Regency

Produksi padi pada tahun 2009 di Kabupaten Asahan sebesar 88.391 ton dengan luas panen 19.139 Ha. Dengan demikian bahwa Kabupaten Asahan turut menyumbangkan beras bagi kebutuhan daerah di Kabupaten ataupun di Propinsi Sumatera Utara (Tabel 1).

Salah satu dari kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah tersebut adalah mengenai harga gabah dan beras, yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1973, dan telah mengalami perubahan atau penyesuaian. Dimana kebijakan ini ditetapkan atas dasar pertimbangan dalam rangka untuk meningkatkan produksi pangan nasional serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar.

Implementasi kebijakan harga dasar dan harga batas tertinggi diantaranya Bulog melakukan pengadaan gabah dan beras dalam negeri selama musim panen untuk menjaga harga dasar dan untuk mengisi persediaan. Jika pengadaan tidak mencukupi untuk kebutuhan penyaluran, Bulog melakukan impor beras dari luar negeri. Pada waktu musim paceklik, dilakukan operasi pasar untuk mengurangi fluktuasi harga beras musiman.

Sudah diketahui bahwa salah satu penyebab kelangkaan beras atau sering tidak stabilnya harga beras selama ini di Indonesia adalah masih amat rapuhnya distribusi beras. Oleh karena itu, baik dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) maupun dalam implementasi kebijakan pengamanan beras jangka panjang, cara kerja BULOG harus disempurnakan agar dapat kembali berfungsi sebagai stabilisator harga

dan mampu menjaga stok dalam tingkat ketahanan pangan yang cukup. Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah, ada sejumlah instrument yang bisa digunakan oleh BULOG agar bisa secara efektif menjalankan fungsi stabilisasinya. Salah satunya adalah pengenaan bea masuk (BM) bagi beras impor yang sesuai dengan musim, sehingga bisa melindungi petani pada saat panen (Tambunan, 2003).

Tujuan utama kebijakan harga dasar gabah ialah menjamin harga gabah minimum ditingkat petani, yang berarti menjamin pendapatan minimum, mencegah penurunan atau meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan harga dasar gabah yang " bermakna" memiliki dua fungsi (tujuan) diantaranya (i) meningkatkan harga gabah yang diterima petani (meningkatkan pendapatan petani), dan (ii) meningkatkan stabilitas harga gabah ditingkat petani. Apabila kedua fungsi ini tidak tercapai maka kebijakan harga dasar gabah tidak efektif sama sekali.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan pengalaman dan keberhasilan daerah lain dalam melaksanakan program stabilitas harga gabah/beras di daerah, sejak tahun 2009 hingga kini Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan mengembangkan suatu kegiatan berupa pengembangan modal pemanfaatan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(P-LDPM) untuk pembelian gabah/beras petani. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipandang sebagai suatu pemberian "Dana Talangan" kepada Gapoktan agar kemampuan pembiayaan mereka bertambah untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya, pada tingkat wajar yang mengacu pada kebijakan HPP. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) memiliki beberapa tujuan diantaranya ;

- a. Memberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok, sehingga mampu untuk : (i) mengembangkan sarana penyimpanan (gudang), (ii) melakukan pembelian gabah/beras dan atau pangan pokok lokal spesifik lainnya bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan (iii) melakukan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya sehingga harga pangan di tingkat petani saat panen raya stabil.
- b. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah dengan : (i) meningkatkan volume pembelian gabah/beras/jagung, (ii) meningkatkan volume penjualan gabah/beras/jagung sehingga modal usaha Gapoktan meningkat, dan (iii) meningkatkan nilai tambah produk melalui kegiatan penyimpanan / pengolahan / pengepakan.
- c. Memperluas jejaring kerjasama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya.

Dengan demikian beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik Gapoktan penunjang pelaksanaan P-LDPM di Kabupaten Asahan ?
2. Bagaimana peningkatan harga gabah sebelum dan setelah di gulirkannya Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di Kabupaten Asahan.
3. Bagaimana peningkatan produksi gabah sebelum dan setelah di gulirkannya Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di Kabupaten Asahan.

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik Gapoktan penunjang pelaksanaan P-LDPM di Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan harga gabah sebelum dan setelah digulirkannya Dana P-LDPM di Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan produksi gabah sebelum dan setelah digulirkannya Dana P-LDPM di Kabupaten Asahan.

1.4. Kegunaan Penelitian.

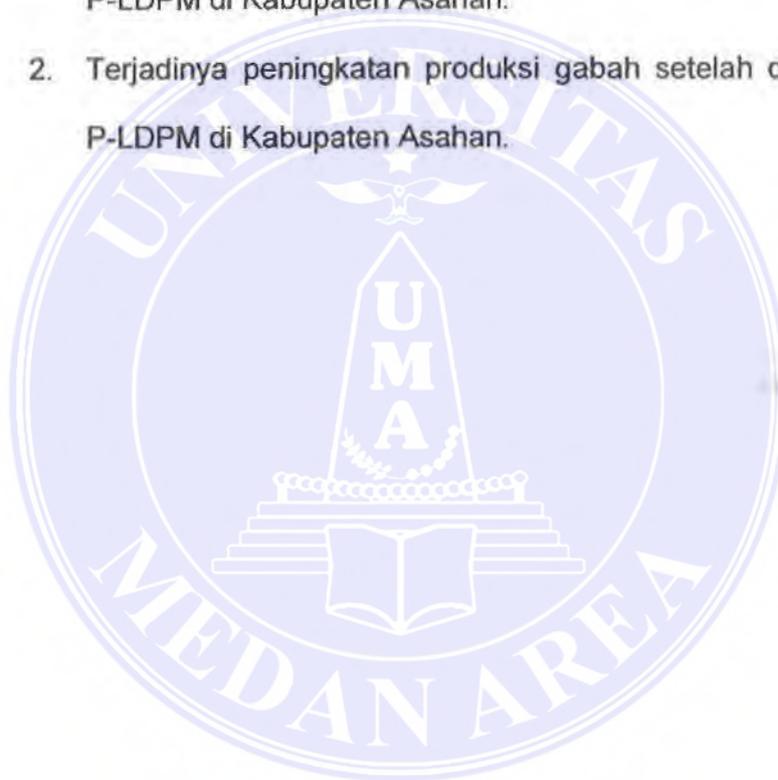
1. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berkenaan dengan hal pemberian Dana bagi

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di kabupaten Asahan.

2. Untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian pendidikan Magister Agribisnis pada Pascasarjana Universitas Medan Area.

1.5. Hipotesis

1. Terjadinya peningkatan harga gabah setelah digulirkannya P-LDPM di Kabupaten Asahan.
2. Terjadinya peningkatan produksi gabah setelah digulirkannya P-LDPM di Kabupaten Asahan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani berdasarkan manajemen kemitraan merupakan suatu proses untuk merubah pola pikir yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Sistem ini dilandasi oleh filosofi kemitraan baik antar individu, kelompok maupun antar kelembagaan petani dengan mitra usaha (Saragih B, 2001).

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

Proses pemberdayaan tersebut tidak lagi menganut pola serapan, tetapi didesentralisasikan sesuai potensi dan keragaman sumberdaya wilayah. Upaya peningkatan ketahanan pangan tidak perlu terfokus pada pengembangan pertanian (dalam arti primer), tetapi diarahkan pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi.

Berbagai upaya pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui :

Pertama, pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh dan peneliti. Teknologi yang dikembangkan harus berdasarkan spesifik lokasi yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan usahatani dan kesejahteraan petani.

Kedua, penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pada pengadaan sarana produksi, tetapi meliputi sarana pengembangan agribisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain.

Ketiga, revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan lokal berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis.

Revitalisasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat yang sangat urgen dilakukan sekarang adalah pengembangan lumbung pangan, agar mampu memberikan kontribusi

yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan upaya pembenahan lembaga pangan yang tidak hanya dalam arti fisik lembaga, tetapi juga pengelolaannya agar mampu menjadi lembaga penggerak perekonomian di pedesaan (<http://hardiaputra.wordpress.com/pemberdayaan-petani-dalam-rangka-pemantapan-ketahanan-pangan-nasional>. 08 Agustus 2011).

Sektor Pertanian tumbuh lebih dari 57 %, karena strategi Pembangunan ekonomi memang Berbasis pertanian. Peningkatan produksi pangan, Perkebunan, perikanan dan Peternakan hampir semuanya Tumbuh tinggi dan bahkan Mencatat angka pertumbuhan Produksi 6.8 persen. Revolusi Hijau telah cukup berjasa meningkatkan produktivitas pangan sampai 5.6 persen dan akhirnya mencapai puncaknya Pada pencapaian swasembada Pangan yang mengantar Presiden Soeharto ke meja Kehormatan FAO di Roma. Pertumbuhan produktivitas Tenaga kerja pun cukup ampuh Untuk mengentaskan Masyarakat Indonesia (Arifin B, 2004).

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Meskipun sebagai bahan makanan pokok padi dapat digantikan oleh bahan makanan lainnya. Namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan lainnya (Mardianto S, 2001).

Beras mempunyai peranan yang strategis dalam pemantapan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan / stabilitas politik

nasional. Pengalaman di tahun 1966 dan 1998 menunjukkan bahwa goncangan politik dapat berubah menjadi krisis politik yang dahsyat karena harga pangan melonjak tinggi dalam waktu singkat. Sementara itu pada masa transisi politik saat ini, karena ketersediaan pangan cukup aman, maka masalah pangan tidak menjadi pendorong kemelut ekonomi (Hutagalung M, 2007).

Beras juga merupakan makanan pokok, menjadi ujung tombak ketahanan pangan wilayah dan nasional. Peran itu sudah terjadi berabad – abad lalu dan disistematisasikan pada masa pemerintahan orde baru. Dengan demikian, kepentingan ketahanan pangan sekaligus kepentingan tenaga kerja dan kependudukan bukan lagi menjadi isu ekonomi dan perdagangan semata, tetapi menjadi wilayah politik ekonomi karena aspek strategis berbagai bidang itu menuntut peran pemerintah yang proporsional bagi dan efektif (Sembiring S, 2011).

Sebagai negara agraris, Indonesia tidak layak mengimpor beras. Apalagi menurut perkiraan, produksi beras tahun 2005 mengalami surplus. Bahkan akhir Januari lalu, Menteri Pertanian memproyeksikan produksi padi nasional tahun 2006 mencapai lebih dari 54 juta ton sehingga tidak perlu impor beras. Luas panen musim tanam 1 tahun 2005/2006 diproyeksikan 5,5 juta hektar sehingga paling sedikit menghasilkan 15 juta ton beras (Suganda, Kompas 30 Januari 2006).

Beras bagi kehidupan bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting. Dari jenis bahan pangan yang dikonsumsi, beras memiliki urutan

utama. Hampir seluruh penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Beras merupakan nutrisi penting dalam struktur pangan, karena itu peranan beras memiliki peranan strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tingkat partisipasi konsumsi beras di berbagai wilayah baik dikota maupun di desa cukup tinggi yaitu sekitar 97 – 100 %. Konsumsi dalam negeri cenderung meningkat terutama di dorong oleh pertumbuhan penduduk. Kebutuhan konsumsi beras per kapita/tahun di Sumatera Utara pada tahun 2011 yaitu 134.13 kg. Harga gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air maksimum 14 %T dan kadar hampa / kotoran maksimum 3 % Rp. 4.150 / kg, harga gabah kering simpan (GKS) Rp. 1.500 / kg dan harga gabah kering giling di Bulog adalah Rp. 4.200/kg, sedangkan harga gabah kering panen (GKP) dengan kualitas kadar air maksimum 25 % dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp. 3.300 / kg di petani atau Rp. 3.350 / kg di penggilingan sesuai Inpres RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 (Gubernur Sumut, 2012).

Rakyat Indonesia adalah rakyat yang mampu memproduksi tetapi hanya sebahagian kecil yang mampu untuk mengembangkan usahanya dan sebahagian besar hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain :

1. Modal yang dimiliki sangat terbatas,
2. Pengetahuan tentang perekonomian yang dimiliki sangat terbatas,

3. Usaha hanya ditujukan untuk kebutuhan keluarga,
4. Kesadaran untuk bekerja sama dalam menyatukan usaha masih kurang (Subiyekto, 1993).

Kebijakan harga dasar gabah telah dimulai sejak musim tanam awal Repelita I yaitu tahun 1969/1970 dan terus berlangsung hingga saat analisis ini dilaksanakan. Setiap tahunnya, harga dasar gabah ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia tentang Penetapan Harga Dasar Gabah. Ada beberapa macam harga dasar yang ditetapkan pada setiap Inpres, yaitu harga dasar gabah, harga pembelian gabah terendah oleh BULOG dan harga pembelian beras oleh BULOG (Adi, A 2002).

Ketentuan-ketentuan tentang harga pembelian gabah oleh BULOG dari petani di tingkat BULOG adalah: (1) Apabila harga gabah sama atau di bawah harga dasar, maka untuk pengamanan harga dasar itu BULOG harus membeli gabah dari petani atau kelompok tani pada berbagai tingkat kualitas sesuai dengan pedoman harga pembelian; (2) Apabila pembelian gabah oleh BULOG dilakukan di tempat petani, maka harga pembelian adalah harga dasar dikurangi ongkos angkut ke gudang BULOG; dan (3) Apabila di suatu kecamatan tidak ada BULOG atau apabila BULOG yang ada tidak mampu mengamankan harga dasar, maka BULOG dapat menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Operasional Pengadaan Dalam Negeri untuk melakukan pembelian langsung dari petani (Adi, A, 2002).

Pada dasarnya Bulog didirikan untuk menguntungkan produsen dan sekaligus tidak merugikan konsumen. Bulog diperlukan untuk membantu petani, menjamin kecukupan pangan bagi penduduk dan mematahkan dominasi pelaku pasar yang berusaha memperoleh keuntungan sebesar – besarnya (Amang dan Husein, 1999).

Pergerakan barang dari suatu daerah ke daerah lain didorong oleh adanya perbedaan harga yang merupakan mekanisme dinamis pasar dalam mencapai terwujudnya keseimbangan. Pergerakan ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah ketersediaan beras dan perbedaan preferensi dan daya beli masyarakat. Harga beras mempunyai pengaruh yang besar bagi konsumen komoditas pangan lainnya. Sebaliknya, perubahan harga – harga komoditas non beras berpengaruh relatif kecil terhadap konsumen beras. Setelah memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk setempat, apabila masih ada surplus maka kelebihan stok beras akan di perdagangkan untuk memenuhi kebutuhan daerah – daerah sekitarnya terutama daerah defisit beras. Hubungan perdagangan antar daerah adalah bagian dari mekanisme sistem pasar yang akan membawa kearah keseimbangan pemerintahan dan penawaran pada tingkat nasional (Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, 2001).

Selain itu, konsekuensi logis dari rendahnya harga beras di tingkat petani adalah bahwa disinsentif yang dihadapi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya menjadi sangat besar. Harus disadari bahwa motivasi kerja petani dapat meningkat sangat tergantung pada

harga beras. Kalau harga beras lebih rendah dari biaya produksi, semangat kerja pun merosot. Sesuai teori ekonomi mikro, harga suatu produk yang terlalu rendah tidak akan menggairahkan orang untuk menghasilkan produk tersebut. Berarti akan sedikit sekali petani Indonesia yang bersemangat menjadi produsen beras karena memproduksi komoditas pertanian lain yang memiliki harga jual yang lebih tinggi menjadi jauh lebih rasional (Arifin B, 2001).

Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan nasional pada dasarnya ada lima yaitu : meningkatkan produksi padi, meningkatkan pendapatan petani, mengurangi keseimbangan harga di produsen dan konsumen, mengendalikan keseimbangan harga beras di antara pasar domestik dengan pasar internasional dan stabilisasi harga beras oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme buffer stock, yaitu dengan menetapkan harga dasar dan harga batas tertinggi. Harga dasar (minimum) di jamin pemerintah untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak terkendali terutama musim paceklik. Ini semuanya diusahakan dengan pengadaan beras dikala panen dan penyaluran di kala paceklik (Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, 2001).

Kebijakan pengadaan pangan yang selama ini diterapkan bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Pengadaan pangan tersebut dapat dipenuhi melalui produksi domestik dan impor produk pangan dari negara lain. Ketergantungan pangan terhadap impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan

harga beras. Kalau harga beras lebih rendah dari biaya produksi, semangat kerja pun merosot. Sesuai teori ekonomi mikro, harga suatu produk yang terlalu rendah tidak akan menggairahkan orang untuk menghasilkan produk tersebut. Berarti akan sedikit sekali petani Indonesia yang bersemangat menjadi produsen beras karena memproduksi komoditas pertanian lain yang memiliki harga jual yang lebih tinggi menjadi jauh lebih rasional (Arifin B, 2001).

Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan nasional pada dasarnya ada lima yaitu : meningkatkan produksi padi, meningkatkan pendapatan petani, mengurangi keseimbangan harga di produsen dan konsumen, mengendalikan keseimbangan harga beras di antara pasar domestik dengan pasar internasional dan stabilisasi harga beras oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme buffer stock, yaitu dengan menetapkan harga dasar dan harga batas tertinggi. Harga dasar (minimum) di jamin pemerintah untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak terkendali terutama musim paceklik. Ini semuanya diusahakan dengan pengadaan beras dikala panen dan penyaluran di kala paceklik (Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, 2001).

Kebijakan pengadaan pangan yang selama ini diterapkan bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Pengadaan pangan tersebut dapat dipenuhi melalui produksi domestik dan impor produk pangan dari negara lain. Ketergantungan pangan terhadap impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan

nasional berkaitan dengan resiko dan ketidakpastian penyediaan pangan dunia dan situasi pasar pangan internasional. Adapun satu hal pokok yang memerlukan penanganan dengan seksama dalam kaitannya dengan pelaksanaan impor adalah : membatasi masuknya impor secara berlebihan. Impor yang berlebihan dapat berdampak negatif pada pembangunan pertanian dan industri di dalam negeri. Di samping itu Indonesia merupakan peluang pasar bagi Negara lain mengingat jumlah penduduk yang besar, apabila impor tidak dapat dibatasi maka produk impor dapat merusak perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Impor beras dalam dekade ini terus meningkat sehingga harga beras dalam negeri akan semakin menurun. Hal ini akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan petani semakin buruk (Tambunan, 2003).

Meningkatnya impor komoditas pertanian antara lain disebabkan lebih rendahnya harga komoditas tersebut dipasar internasional dibanding harga domestik. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tidak dimanfaatkannya batas maksimum bea masuk sesuai komitmen Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*). Kesenjangan harga ini juga dimungkinkan sebagai akibat terjadinya penyelundupan baik secara fisik maupun secara administratif atau lebih dikenal dengan "*undisder invoicing*" yang saat ini disinyalir marak kembali. Keadaan ini mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari bea masuk dan pajak impor lainnya. Disamping itu dengan tidak diketahuinya secara pasti total impor komoditas pangan utama (khususnya beras) akan berdampak rawan pada sistem ketahanan

pangan nasional, yang menyebabkan upaya – upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan nasional akan menjadi tidak efektif (Tambunan, 2003).

2.2. Kerangka Pemikiran

Tingkat pendapatan usaha tani yang tinggi dapat diperoleh petani dengan menjual hasil panen dengan harga yang tinggi, dengan dasar ini keputusan seorang petani untuk menanam komoditi padi dipengaruhi oleh harga yang akan diperoleh dari hasil penjualan padi (gabah), tanpa perdulikan apakah keputusan tersebut dapat mempengaruhi kebutuhan akan pangan nasional.

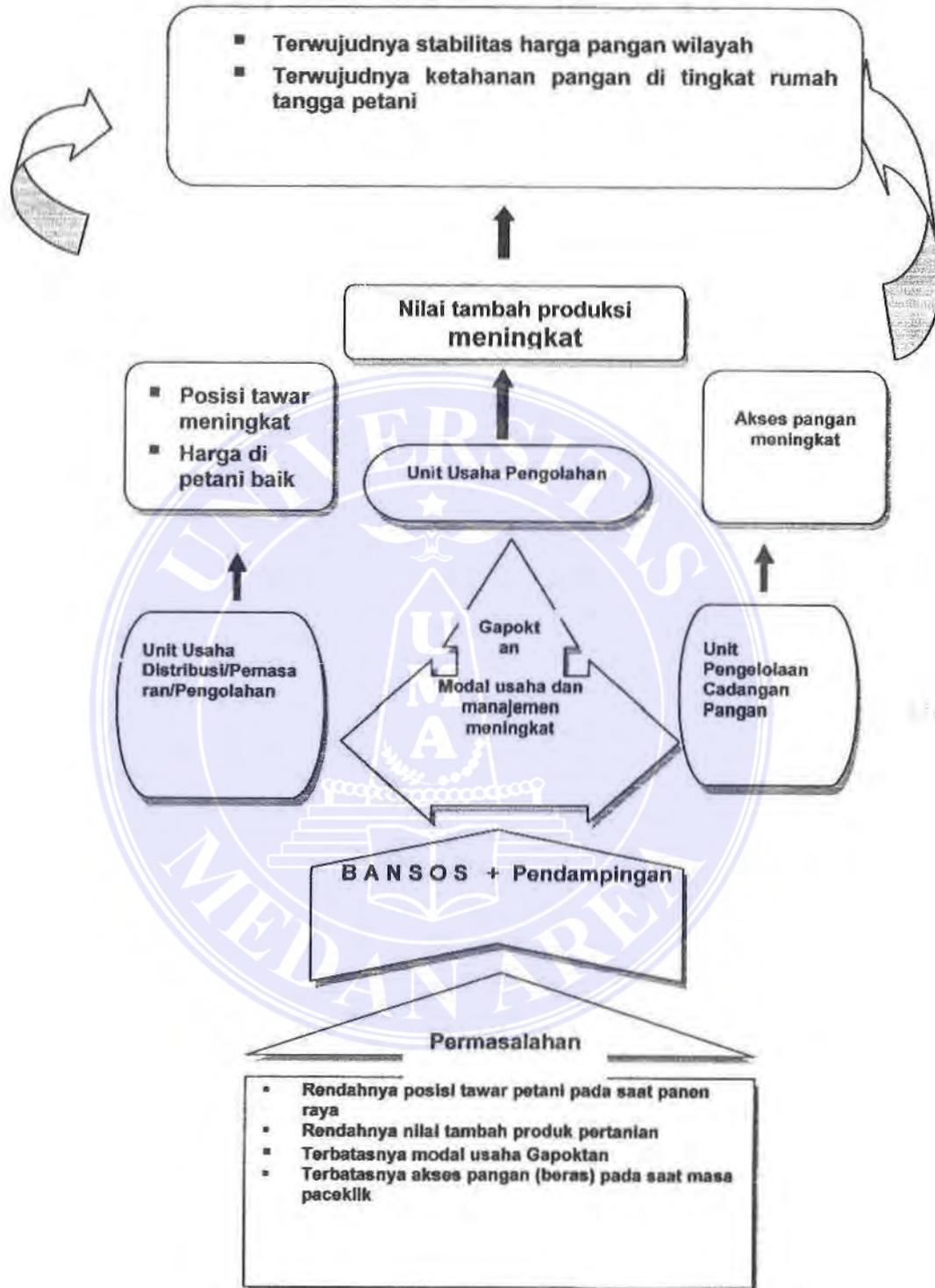
Harga dasar gabah yang merupakan kebijakan pemerintah dianggap mampu untuk dapat mensejahterakan petani, baik secara sosial maupun ekonomi. Dimana faktor sosial dan ekonomi ini merupakan karakteristik yang membedakan individu petani dengan petani lainnya. Faktor – faktor ini berpengaruh besar terhadap kehidupan petani. adapun faktor sosial, dalam hal ini menyangkut pola pengambilan keputusan yakni kemana petani menjual hasil panen padi sawah mereka di daerah penelitian. Sedangkan faktor ekonomi petani adalah menyangkut pendapatan bersih usaha tani, luas lahan yang diusahakan dan curahan tenaga kerja petani padi sawah (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

A. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM adalah untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui: (i) pengembangan unit-unit usaha (unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan) dan (ii) pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.



KERANGKA PIKIR KEGIATAN PENGUATAN-LDPM



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Kegiatan Penguatan - LDPM

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: (i) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik disaat panen raya; (ii) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah produksi pangan dan usahanya melalui kegiatan pengolahan/pengepakan/pemasaran sehingga terjadi perbaikan pendapatan di tingkat petani; dan (iii) memperkuat kemampuan Gapoktan dalam melakukan pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu mendekatkan akses pangan pada saat menghadapi paceklik kepada anggota petani yang tergabung dalam wadah Gapoktan. Dana bantuan sosial (bansos) yang telah disalurkan ke : (i) Gapoktan tahap Penumbuhan wajib digunakan untuk pembangunan sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras dan/atau pangan lokal spesifik lainnya; dan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya, (ii) Gapoktan tahap Pengembangan wajib digunakan untuk pengadaan gabah/beras dan/atau pangan lokal spesifik lainnya; dan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya. Sedangkan Gapoktan tahap Kemandirian wajib mengelola dana Bansos yang diterimanya secara berkelanjutan untuk terus digunakan untuk pembelian gabah/beras/jagung sehingga terjadi memupukan modal dari kegiatan pembelian dan penjualan pangan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, 2011).

Melalui kebijakan pemerintah dengan memberdayakan Gapoktan di daerah sentra produksi diharapkan dapat meminimalkan tingkat fluktuasi

harga di wilayah pada saat panen raya sehingga terwujudnya stabilisasi harga di tingkat petani. Dengan mengendalikan tingkat harga pangan diharapkan dapat mengatasi inflasi, dan merangsang bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan efisien.

B. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM antara lain memberdayakan Gapoktan agar unit-unit usaha yang dikelolanya mampu mengatasi permasalahan khususnya ketidakmampuan mereka untuk mengakses pangan di saat paceklik, masalah harga pangan yang jatuh disaat panen raya dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mendistribusikannya keluar wilayahnya, dan masalah pembiayaan/modal usaha.

Gapoktan yang memperoleh bimbingan dari pendamping dan Tim Teknis Kabupaten secara partisipatif, musyawarah dan mufakat agar mampu: (a) menemukan masalah yang dihadapi pada saat menghadapi panen raya dan pada saat menghadapi musim paceklik, dan (b) merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah dan mufakat mengenai upaya yang akan dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat petani melalui kegiatan pembelian-penjualan hasil produksi petani secara berkelanjutan dan penyediaan pangan bagi anggotanya disaat menghadapi musim paceklik

Selanjutnya Gapoktan/Poktan/petani beserta unit-unit usahanya disadarkan agar mereka mampu untuk menghilangkan ketergantungan dari pihak lain, didorong agar tumbuh kemandiriannya, dan didukung/difasilitasi oleh pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Propinsi agar mereka dapat berkembang secara swadaya dan berkelanjutan untuk mengembangkan usahanya secara produktif.

Melalui upaya pemberdayaan, Gapoktan diharapkan sebagai organisasi petani yang tumbuh dan berkembang menjadi "prime mover" bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani. Ke depan Gapoktan mampu mengembangkan unit-unit usaha yang dikelolanya dengan : (i) meningkatkan kerja sama yang transparan antara Gapoktan dengan unit-unit usaha yang dikelola Gapoktan; (ii) menghimpun dan mengembangkan/mempuk dana yang dikelola oleh masing-masing unit usaha/Gapoktan dari usaha bisnis yang dikelolanya; (iii) menerapkan aturan dan sanksi yang telah dirumuskan dan ditetapkan sendiri secara musyawarah dan mufakat oleh petani anggotanya; dan (iv) meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam hal: administrasi (AD/ART), pembukuan, pemantauan secara partisipatif, pengawasan internal, dan kemitraan serta negosiasi dengan pihak lain untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

C. Strategi

Strategi dasar dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM antara lain adalah (i) memperkuat modal usaha Gapoktan untuk dapat melakukan kegiatan pembelian-penjual gabah/beras/jagung terutama dari hasil petani anggotanya, membangun sarana penyimpanan dan pengadaan cadangan pangan; (ii) memberikan pendampingan kepada Gapoktan agar mampu mengembangkan dan mengelola unit-unit usahanya dengan baik; (iii) meningkatkan kemampuan SDM Gapoktan dalam mengadministasikan kegiatannya dan membuat laporan secara rutin.

Sedangkan strategi untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah sebagai pelaksana kegiatan P-LDPM antara lain dilakukan beberapa kegiatan yaitu: (i) apresiasi bagi para aparat provinsi/kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan di lapang; (ii) apresiasi bagi para pendamping yang akan mendampingi Gapoktan Tahap Penumbuhan; dan (iii) apesiasi terhadap Gapoktan agar mampu secara teknis dan administrasi dalam mengembangkan unit-unit usaha yang dimilikinya dalam hal pembelian-penjualan gabah/beras/jagung terutama hasil produksi petani anggotanya, pengadaan cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi paceklik dengan memanfaatkan dana Bansos secara efektif dan efisien.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) desa pada wilayah Kabupaten Asahan propinsi Sumatera Utara yaitu : Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Desa Taman Sari Kecamatan Pulau Bandring, Desa Meranti Kecamatan Meranti dan Desa Silau Tua Kecamatan Setia Janji. Daerah pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (Purposive sampling), dengan dasar pertimbangan disebabkan daerah ini merupakan desa sentra produksi padi di Kabupaten Asahan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2012.

3.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para responden yaitu petani (anggota Gapoktan) serta kepada pengurus Gapoktan atau Poktan.

Data sekunder diperoleh dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik serta instansi terkait yang

dianggap dapat menjadi pendukung penyempurnaan laporan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari observasi lapangan, kepustakaan dan internet.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan metode wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait, penyebaran kuisisioner dan studi literatur. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan responden dengan harapan agar peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai karakteristik responden, karakteristik usaha, pendapatan usaha. Pengumpulan data dengan cara ini dilengkapi dengan kuisisioner yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan kuisisioner bermanfaat sebagai pemandu agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknis penggunaan atau pengisian kuisisioner oleh responden akan dipandu oleh peneliti. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi perkembangan pelaksanaan program P-LDPM, mekanisme proses penyaluran P-LDPM dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, juga dikumpul data – data penunjang seperti gambaran umum lembaga di desa dalam hal ini Gapoktan serta potensi usaha di wilayah peneliti.

3.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif melalui survey. Metode meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa yang akan datang.

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani yang mendapatkan bantuan program P-LDPM di Kabupaten Asahan mulai tahun anggaran 2009 hingga tahun anggaran 2011.

2. Sampel dan Metode Penarikan Sampel

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 81 orang petani yang berdasarkan pada metode Slovin (1996) dalam Prihartono, 2009 yang menggunakan Rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi yaitu 10 persen.

Dengan rumus Slovin tersebut maka jumlah sampel penelitian adalah :

$$n = \frac{427}{1 + 427 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{427}{1 - 4,27}$$

$$n = \frac{427}{5,27}$$

$$n = 81,02 \quad \text{Maka di bulatkan menjadi 81}$$

Kemudian penentuan sampel untuk masing-masing gapoktan, dilakukan dengan menggunakan metode *Proportional random sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan jumlah tergantung besar kecilnya sub populasi atau kelompok yang akan diwakilinya (Mardikanto, 2006).

Tahap-tahap penentuan sample adalah :

- a. Tahap pertama, adalah dengan mendata Gapoktan yang ada di setiap kecamatan.
- b. Tahap kedua, setelah diperoleh data Gapoktan yang dimaksud, kemudian diambil secara proporsional dari masing-masing Gapoktan. Penentuan jumlah sampel petani responden untuk masing-masing Gapoktan ditentukan dengan rumus (Sugiyono, 2009):

$$n_i = \frac{n \cdot k}{N} \cdot n$$

Dimana:

- n_i : Jumlah sampel dari masing-masing Gapoktan.
- n_k : jumlah petani dari masing – masing Gapoktan.
- N : Jumlah populasi atau jumlah seluruh petani Gapoktan.
- n : Jumlah responden sebanyak 81.

Pengujian terhadap parameter dugaan dilakukan dengan menggunakan Uji t dengan rumus paired sample t-test sebagai berikut :
(sumber t-test/SAM/F.Psi.UA/2006).

$$t = \frac{\bar{D}}{\left(\frac{SD}{\sqrt{N}}\right)}$$

keterangan :

t = Nilai t hitung

\bar{D} = Rata – rata selisih pengukuran 1 dan 2

SD = standard deviasi selisih pengukuran 1 dan 2.

N = Jumlah sample.

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kriteria uji :

- Ⓐ Jika Nilai $t_{\text{hitung}} \leq$ Nilai t_{tabel} , maka H_0 tidak ditolak, sehingga $\mu_{p_1} = \mu_{p_0}$ yang berarti bahwa fluktuasi harga dan produksi gabah tidak berbeda nyata sebelum dan sesudah digulirkannya Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).
- Ⓑ Jika Nilai $t_{\text{hitung}} >$ Nilai t_{tabel} , maka H_0 ditolak (terima H_1), sehingga $\mu_{p_1} \neq \mu_{p_0}$ yang berarti bahwa fluktuasi harga dan produksi gabah berbeda nyata sebelum dan sesudah digulirkannya Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).

3.6 Defenisi Variabel Operasional Penelitian.

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
2. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) merupakan salah satu sub kegiatan dari (a) program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan tahun 2011 dan (b) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilisasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan melalui penyaluran dana Bansos ke Gapoktan sasaran. Kegiatan P-LDPM merupakan kegiatan yang berkelanjutan mulai dari Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan hingga ke Tahap Kemandirian.
3. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/PP.310/1/2010 atau disesuaikan dengan perturan yang berlaku.
4. Harga Referensi Daerah (HRD) adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat.

5. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Permentan No: 273/Kpts/OT.160/ 4/2007).
6. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerjasama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usahatani, memanfaatkan sumberdaya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
7. Rencana Usaha Gapoktan (RUG) adalah rencana usaha yang disusun oleh anggota kelompok tani secara sistematis dan partisipatif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani / Poktan dalam mendistribusikan / memasarkan / mengolah/menyimpan yang tidak dapat diselesaikan oleh petani/Poktan tersebut sehingga membutuhkan kerja sama dan dukungan dalam skala yang lebih besar.
8. Unit usaha distribusi / pemasaran adalah unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan, terutama untuk membantu petani anggotanya dalam mendistribusikan gabah/

- beras/ jagung di saat panen raya sehingga harga stabil di tingkat petani.
9. Unit usaha pengolahan adalah unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk gabah/ beras/ jagung melalui kegiatan mengolah/menggiling/mengepak/menyimpan sehingga memberikan keuntungan bagi Gapoktan.
 10. Unit pengelola cadangan pangan adalah unit pengelolaan cadangan pangan yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat menyediakan cadangan pangan terutama bagi anggotanya khususnya disaat menghadapi musim paceklik.
 11. Pemberdayaan Gapoktan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian Gapoktan secara partisipatif agar mereka mampu menemukanali permasalahan: (a) ketidak mampuan anggotanya mengakses pangan di saat paceklik dan mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi petani; dan (b) mencari, merumuskan, dan memutuskan dengan cara yang cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi secara bersama dan musyawarah dengan anggotanya.

12. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping berupa bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke Gapoktan binaannya agar mereka mampu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan secara partisipatif; menyusun dan menetapkan aturan dan sanksi secara musyawarah dan mufakat; memupuk dan mengatur dana sendiri; membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan usaha dengan pihak lain diluar wilayahnya; memupuk rasa tanggungjawab terhadap organisasi Gapoktan dengan melakukan pemantauan secara partisipatif, pengendalian dan pengawasan internal.
13. Kemandirian adalah suatu tahapan dimana Gapoktan sudah mempunyai kemampuan mengelola unit usahanya baik distribusi/pemasaran/ pengolahan maupun pengelolaan cadangan pangan secara produktif, yang dicirikan dengan aspek administrasi yang baik (pencatatan, pembukuan, resi/dokumen), dan aspek teknis (bisnis sudah menguntungkan melalui kerjasama dengan mitra, mampu mempunyai akses kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan modal usahanya) serta tidak tergantung pada bantuan pemerintah.

IV. DESKRIPSI KEGIATAN P-LDPM

4.1 P-LDPM di Kabupaten Asahan.

Sejak tahun 2009 hingga saat ini tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui kegiatan Penguatan-LDPM menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos) langsung ke Gapoktan untuk digunakan sebagai modal untuk kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras dan untuk membangun sarana penyimpanan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah mendorong Gapoktan agar mampu memiliki sarana penyimpanan (gudang) yang menjadi milik Gapoktan dan dapat digunakan untuk menyimpan cadangan pangan bagi anggotanya saat paceklik. Dengan membangun cadangan pangan yang dimiliki oleh Gapoktan diharapkan petani – petani yang berada dalam wadah Gapoktan dapat terpenuhi kebutuhannya jika mereka memerlukannya. Hal tersebut akan memudahkan petani anggotanya untuk mengakses pangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar untuk dapat menjalankan kehidupannya sehari – hari menjadi lebih produktif. Di sisi lain diharapkan Gapoktan mampu memberdayakan unit usahanya agar mampu membeli gabah/beras terutama dari hasil produksi petani anggotanya dengan harga serendah-rendahnya sesuai dengan HPP untuk gabah/beras.

4.2. Sasaran Penerimaan P-LDPM.

Sasaran kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah : (1) Gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, (2) Gapoktan yang memiliki unit usaha distribusi, pemasaran, pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan, (3) Gapoktan yang memiliki lahan sendiri untuk membangun sarana penyimpanan (gudang).

Adapun sasaran wilayah Penguatan – LDPM di Kabupaten Asahan dari tahun 2009 hingga tahun 2011, mulai dari tahap pra penumbuhan hingga tahap kemandirian adalah Kecamatan dengan sasaran penerima kegiatan P-LDPM sebanyak 4 kecamatan yang terdiri dari gabungan kelompok tani.

Tabel 2. Nama Gapoktan, Lokasi Gapoktan dan Tahapan Gapoktan Penerima Dana Penguatan – LDPM Kabupaten Asahan sejak tahun 2009 s/d tahun 2011.

No	Desa	Kecamatan	Gapoktan	Jumlah anggota (petani)	Luas Lahan (ha)	Tahapan / Tahun
1	Punggulan	Air Joman	Makmur Rezeki	129	186	Menuju Kemandirian (2009)
2	Taman Sari	Pulo Bandring	Maju Bersama	75	133	Menuju Kemandirian (2009)
3	Sei Silau Tua	Setia Janji	Rahayu	92	27	Pengembangan (2010)
4	Meranti	Meranti	Sejahtera	131	175	Penumbuhan (2011)

Sumber : BP2KP Kabupaten Asahan, 2011

Tabel 3. Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah + Padi Ladang Kabupaten Asahan Tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010

Tahun 2008

No	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata – rata Produktivitas (Kw/ha)
1	BP. Mandoge	341	666	19,53
2	Bandar Pulau	293	756	25,80
3	Pulau Rakyat	270	1.162	43,04
4	Aek Kuasan	-	-	-
5	Sei Kepayang	5.230	23.619	45,16
6	Tanjung Balai	-	-	-
7	Simpang Empat	205	875	42,66
8	Air Batu	240	855	35,64
9	Buntu Pane	796	3.693	46,39
10	Meranti	9.839	44.699	45,43
11	Air Joman	411	1.855	45,14
12	Kisaran Barat	-	-	-
13	Kisaran Timur	-	-	-
Jumlah		17.625	78.179	44,36

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, 2008.

Tahun 2009.

No	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata – rata Produktivitas (Kw/ha)
1	BP. Mandoge	374	759	20,30
2	Bandar Pulau	104	207	19,86
3	Aek Songsongan	180	521	28,93
4	Rahuning	-	-	-
5	Pulau Rakyat	430	1.756	40,83
6	Aek Kuasan	100	199	26,43
7	Aek Ledong	-	-	-
8	Sei Kepayang	5.209	28.016	53,78
9	Sei Kepayang Barat	-	-	-
10	Sei Kepayang Timur	-	-	-
11	Tanjung Balai	-	-	-
12	Simpang Empat	279	1.371	49,14
13	Teluk Dalam	-	-	-
14	Air Batu	8	31	38,51
15	Sei Dadap	145	558	38,51
16	Buntu Pane	20	90	44,99
17	Setia Janji	1.035	5.683	54,91
18	Tinggi Raja	106	582	54,91
19	Meranti	4.537	27.659	60,96
20	Pulo Bandring	305	1.859	60,96
21	Rawang Panca Arga	6.614	40.321	60,96
22	Air Joman	35	213	60,96
23	Silau Laut	360	2.195	60,96
24	Kisaran Barat	-	-	-
25	Kisaran Timur	-	-	-
Jumlah		19,147	112,020	56,46

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, 2009.

Tahun 2010.

No	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata – rata Produktivitas (Kw/ha)
1	BP. Mandoge	268	1.162	43.36
2	Bandar Pulau	297	1.288	43.36
3	Aek Songsongan	171	742	43.36
4	Rahuning	5	22	43.36
5	Pulau Rakyat	225	976	43.36
6	Aek Kuasan	-	-	43.36
7	Aek Ledong	-	-	43.36
8	Sei Kepayang	3.760	16.303	43.36
9	Sei Kepayang Barat	-	-	43.36
10	Sei Kepayang Timur	-	-	43.36
11	Tanjung Balai	-	-	43.36
12	Simpang Empat	196	850	43.36
13	Teluk Dalam	-	-	43.36
14	Air Batu	-	-	43.36
15	Sei Dadap	10	43	43.36
16	Buntu Pane	10	43	43.36
17	Setia Janji	890	3.859	43.36
18	Tinggi Raja	176	763	43.36
19	Meranti	4.585	19.881	43.36
20	Pulo Bandring	135	585	43.36
21	Rawang Panca Arga	6.567	28.475	43.36
22	Air Joman	134	581	43.36
23	Silau Laut	280	1.214	43.36
24	Kisaran Barat	-	-	-
25	Kisaran Timur	-	-	-
Jumlah		17.709	76.787	43.36

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, 2010.

4.3. Kreteria dan Penentuan Calon Gapoktan.

4.3.1. Gapoktan.

Gapoktan yang akan menjadi penerima dana Bansos kegiatan P-LDPM adalah Gapoktan yang sudah ada atau telah eksis di daerah sentra produksi padi, bukan bukaan baru, dengan kriteria sebagai berikut :

- a). Memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang dikelola oleh petani dan masih aktif hingga saat ini.
- b). Kelompok yang bersangkutan tidak mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain untuk kegiatan yang sama atau sejenis pada saat yang bersamaan atau mendapat modal pada tahun tahun sebelumnya (kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan saling mendukung).
- c). Memiliki unit usaha distribusi atau pemasaran dan atau pengolahan (pengeringan, pembersihan, pengepakan) yang dikelola oleh petani dan masih aktif hingga sekarang).
- d). Memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang berpengalaman, dapat dipercaya, mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan pembelian/pengolahan/penyimpanan dan penjualan gabah/beras sehingga memberikan keuntungan bagi unit usahanya serta mampu mengelola cadangan pangan melalui kerjasama dengan anggotanya.
- e). Memiliki gudang sendiri atau hibah perorangan/pemerintah yang dapat digunakan untuk menampung/menyimpan gabah,beras atau pangan

pokok lokal spesifik lainnya dengan kapasitas simpan 30 – 40 ton. Pengertian memiliki gudang sendiri yaitu gudang yang dibangun oleh dan untuk kepentingan gapoktan perolehannya dapat dari pembelian dan/atau hibah yang berstatus sebagai asset gapoktan yang dibuktikan dengan :

- 1). Dokumen perikatan jual-beli lahan yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT)/Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2). Surat hibah bangunan dari perorangan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh camat/Notaris.
 - 3). Surat penyerahan hibah kepemilikan asset (bangunan) milik pemerintah daerah serta surat pernyataan alih fungsi pemanfaatannya dari semula menjadi gudang penyimpanan pangan.
- f. Memiliki lahan sendiri, atau hibah perorangan/pemerintah daerah, jika akan dibangun sarana penyimpanan (gudang) dengan menggunakan dana Bansos pada lahan tersebut. Pengertian memiliki lahan sendiri adalah lahan yang diperoleh dari pembelian bersama dan/atau hibah yang berstatus sebagai asset gapoktan yang dibuktikan dengan :
- 1). Dokumen perikatan jual-beli lahan yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT)/Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2). Surat hibah lahan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh Camat/Notaris.

- 3). Surat penyerahan hibah kepemilikan asset (lahan milik) pemerintah daerah serta surat pernyataan alih fungsi pemanfaatannya dari semula menjadi lahan untuk membangun gudang penyimpanan pangan.
- g). Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
- h). Memiliki komitmen untuk mengirimkan laporan mingguan secara rutin (setiap hari Senin) dengan menggunakan SMS, ke SMS Center dengan No. 081380829555 dan laporan bulanan ke Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan.

4.4 Tingkatan Organisasi Penguatan – LDPM.

Pelaksanaan kegiatan P-LDPM merupakan kegiatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dengan semangat untuk memperkuat kemampuan gapoktan dalam membantu petani anggotanya khususnya dalam menjaga stabilitas harga gabah/beras dan memperkuat asset untuk penyimpanan dan cadangan pangan yang dimiliki oleh gapoktan maka peran dan partisipasi dari pengurus dan anggota gapoktan menjadi prioritas utama sebagai pelaku untuk mencapai keberhasilan dari kegiatan ini.

4.4.1 Tingkat Gapoktan (Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian dan Pasca Mandiri).

Tugas dan tanggungjawab Pengurus Gapoktan antara lain :

1. Membuat aturan tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota gapoktan sebagai organisasi (AD/ART).
2. Membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya.
3. Menyusun RUG dan rencana pelaksana kegiatan (Tahap Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Pasca Kemandirian).
4. Melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat baik untuk kegiatan yang bersumber dari dana Bansos.
5. Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif dari masing-masing unit usahanya dan anggota kelompok untuk mengembangkan usahanya.
6. Memfasilitasi Ketua/pengurus gapoktan dan unit-unit usahanya dalam menyusun laporan baik secara tertulis ke kabupaten dan pengiriman laporan dengan menggunakan SMS ke pusat.

4.4.2. Tingkat Unit Usaha Gapoktan.

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Usaha Gapoktan distribusi/pemasaran dan atau pengolahan dan Unit Pengelolaan Cadangan Pangan yang memperoleh dana Bansos kegiatan P-LDPM

adalah (i) melakukan kegiatan secara swakelola dan swadaya; (ii) membuat pembukuan (administrasi dan keuangan) secara teratur untuk seluruh kegiatan yang dilakukan (kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras, pengadaan – penyimpanan – penyaluran - pengembalian cadangan pangan dan pembangunan gudang) dan (iii) membuat laporan secara berkala kepada Ketua Gapoktan).

4.4.3. Tingkat Petani

Petani merupakan produsen dari gabah/beras, dimana pada saat tertentu juga sebagai konsumen. Pada saat sebagai produsen menghadapi masalah dalam pendistribusian/pemasaran hasil panennya, maka petani dapat dibantu oleh gapoktan (Unit Usaha Distribusi, Pemasaran dan Pengelolaan) yang mendapatkan dukungan Dana Bansos dari pemerintah, wajib melakukan pembelian membeli gabah/ beras serendah – rendahnya sesuai HPP. Di sisi lain pada saat musim paceklik dimana ada anggota petani tidak menghasilkan produksi pangan sehingga berdampak tidak mempunyai akses terhadap pangan (Unit Pengelolaan Cadangan Pangan) wajib membantu minimal bagi anggotanya dengan menyalurkan (meminjamkan) gabah/beras sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama.

4.5 Indikator Keberhasilan.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Indikator keberhasilan (output) antara lain :
 - a. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya pengelola Gapoktan dan pendamping.
 - b. Tersalurkannya dana Bansos Penguatan-LDPM ke Gapoktan sebagai modal usaha unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan untuk melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras dan modal usaha unit pengelola cadangan pangan untuk pengadaan cadangan pangan.
2. Indikator keberhasilan (outcome) antara lain :
 - a. Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani
 - b. Meningkatnya pembelian gabah/beras/ minimal dari produksi petani anggotanya oleh unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan.
 - c. Tersedianya cadangan pangan di unit pengelola cadangan pangan minimal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
 - d. Meningkatnya modal usaha Gapoktan menjadi lebih besar dari modal awal yang diterimanya.

4.6. Pembiayaan dan Mekanisme Pencairan Dana

4.6.1. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Penguatan-LDPM bersumber dari APBN Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa Dana Dekonsentrasi Propinsi Sumatera Utara. Penggunaan dan pencairan dana Bansos kepada Gapoktan mengikuti aturan dan mekanisme. Dana

Bansos yang bersumber APBN pada tahun 2011 hanya disalurkan ke Gapoktan pada Tahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan disalurkan ke Gapoktan Tahap Pengembangan masing-masing sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta)

Untuk Tahap Pengembangan dana Bansos akan disalurkan ke Gapoktan yang benar-benar sudah terseleksi oleh provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Asahan. Apabila Gapoktan pada Tahap Penumbuhan belum siap untuk masuk ke Tahap Pengembangan, maka dana Bansos sebaiknya tidak dicairkan oleh Kabupaten dan dikembalikan ke Kantor Kas Negara.

4.6.2 Mekanisme Pencairan Dana Bansos

Mekanisme penyaluran dana pencairan dana Bansos untuk Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan mengikuti pedoman umum P-LDPM. Khusus untuk SPP-LS yang akan disampaikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pejabat Pembuat SPM (surat perintah membayar) /Penguji SPP satuan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi wajib melampirkan :

1. SK penetapan Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang menangani ketahanan pangan.

2. Rekapitulasi Rencana Usaha Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan dengan mencantumkan :
 - a). Nama dan alamat lengkap Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan penerima dana kegiatan P-LDPM.
 - b). Nomor Rekening Ketua Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan penerima dana bantuan
 - c). Nama dan alamat kantor cabang bank tempat Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan penerima dana bantuan membuka rekening
 - d). Rincian penggunaan dana kegiatan P-LDPM oleh Gapoktan Tahap Penumbuhan untuk pembelian (gabah/beras), pembangunan / renovasi gudang, pengadaan gabah atau beras untuk cadangan pangan dan Gapoktan Tahap Pengembangan untuk pembelian (gabah/beras) dan pengadaan gabah/beras dan atau pangan pokok spesifik lokal lainnya.
 - e). Kuitansi harus ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

4.7. Pemanfaatan Dana Bansos Penguatan – LDPM Dan Sisa Hasil Usaha (SHU).

4.7.1. Pemanfaatan Dana Bansos Penguatan-LDPM

1. Tahap Penumbuhan.

Dana bansos yang akan diterima oleh Gapoktan tahap penumbuhan adalah masing – masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alokasi pemanfaatan sebagai berikut :

- a). Pembangunan/rehabilitasi gedung/lumbung pangan Gapoktan \pm 30 % dari dana bansos atau maksimum sebesar Rp. 50.000.000,- (sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diterbitkan oleh instansi terkait).
- b). Unit Usaha Cadangan Pangan, maksimal 20 % dari dana Bansos.
- c). Unit Usaha Distribusi/Pemasaran \pm 50 % dari dana Bansos atau minimal Rp. 70.000.000,-

2. Tahap Pengembangan

Dana Bansos tambahan yang diterima oleh gapoktan tahap pengembangan adalah masing masing sebesar Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alokasi pemanfaatan adalah sebagai berikut :

- a). Penguatan Unit Usaha Cadangan Pangan, maksimal sebesar 20 % dari dana Bansos.

- b). Penguatan Unit Usaha Distribusi/Pemasaran, minimal sebesar 80 % dari dana Bansos.

Manakala musim panen gabah telah berakhir atau tidak memungkinkan adanya transaksi pembelian dan penjualan gabah, maka dana Bansos beserta keuntungan yang telah diperoleh unit usaha distribusi harus disetor ke rekening Gapoktan untuk selanjutnya dapat digunakan kembali oleh unit usaha distribusi pada saat musim panen berikutnya tiba.

4.7.2. Pemanfaatan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang bersumber dari keuntungan unit usaha Distribusi dan Cadangan Pangan dimanfaatkan untuk :

1. Penguatan Modal Gapoktan sebesar 50 %.
2. Jasa Pengurus Gapoktan sebesar 20 %
3. Dibagikan kepada anggota melalui pengurus kelompok sebesar 30 %.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dianjurkan 2 x 1 tahun pada saat pertemuan rapat anggota bulan Juni dan Desember tahun berjalan atau sesuai dengan kesepakatan anggota.

4.8 Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan, Serta Pelaporan.

4.8.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM oleh Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap

Kemandirian) dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha distribusi /pemasaran/pengolahan (pembelian-penjualan gabah/beras) dan pengelolaan cadangan pangan. Selanjutnya dilakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan P-LDPM.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian), kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yaitu :

1. Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian) melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam kerangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Bansos untuk usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan.
2. Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota, provinsi dan pusat bersama Tim Teknis terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - a. Penggunaan dana bansos untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Mandiri.
 - b. Pelaksanaan kegiatan (pembangunan gudang, pembelian-penjualan, pengadaan-penyaluran cadangan pangan).

Kemandirian) dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha distribusi /pemasaran/pengolahan (pembelian-penjualan gabah/beras) dan pengelolaan cadangan pangan. Selanjutnya dilakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan P-LDPM.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian), kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yaitu :

1. Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Kemandirian) melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam kerangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana Bansos untuk usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan.
2. Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota, provinsi dan pusat bersama Tim Teknis terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - a. Penggunaan dana bansos untuk Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan/atau Tahap Mandiri.
 - b. Pelaksanaan kegiatan (pembangunan gudang, pembelian-penjualan, pengadaan-penyaluran cadangan pangan).

- c. Stok yang ada di unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan di unit pengelola cadangan pangan.

4.8.2. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh pengawas dalam Gapoktan maupun masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

4.8.3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, dan Tahap Kemandirian), kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Adapun prosedur pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Gapoktan (Tahap Penumbuhan, dan/atau Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian) menyusun dan menyampaikan laporan

perkembangan pengelolaan usaha distribusi (jual beli gabah/beras/jagung) dan pengelolaan cadangan pangan (fisik dan keuangan) kepada Tim Teknis Kabupaten di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan secara tertulis setiap bulan dan melalui SMS center setiap minggu pada hari Senin ke No 0813 808 29 555;

2. Tim Teknis Kabupaten membuat laporan kepada Tim Pembina Provinsi pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi setiap 1-2 bulan; setiap tanggal 1 pada bulan bersangkutan.
3. Tim Pembina Provinsi membuat laporan ke Tim Pembina Pusat di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian setiap 1-2 bulan (bulan genap) setiap tanggal 1 pada bulan bersangkutan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P- LDPM) dapat meningkatkan rata rata harga gabah dari Rp. 2430,92 menjadi Rp. 3068.83.
2. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) dapat meningkatkan rata rata produksi gabah dari 6286,50 ton menjadi 10.760,00 ton.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kepada unit distribusi / pemasaran diharapkan agar lebih bekerja keras dalam peningkatan pendistribusian dengan berpikir kearah yang lebih maju dengan membuka potensi lain, sehingga tidak hanya berfokus terhadap jual beli gabah tetapi pengemasan hasil produksi produksi berupa beras sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani .
2. Kepada unit cadangan pangan harus lebih teliti dan waspada dalam pembelian dan pemberian pinjaman kepada anggota atau

masyarakat, dengan mementingkan kepentingan bersama / kelompok di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

3. Kepada petani, diharapkan membantu serta mengawasi dalam segala bidang demi ketercapaian program pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Abdurachman. 2002. Tekan Import Pangan. Fokus, Minggu, 14 Juli, halaman 32.
- Amang, B dan Husein Sawit, M., 1999. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional. IPB Press, Bogor
- Arifin, Bustanul. 2001. Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- _____ 2004. Refleksi dan Pengembangan Agribisnis Indonesia. AgroMedia No 9 Volume I.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2011. Pedoman Umum Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 2011. Jakarta.
- Gubernur SUMUT. Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Propinsi SUMUT Tahun 2012. Deperindag, Medan.
- (<http://hardiaputra.wordpress.com/pemberdayaan-petani-dalam-rangka-pemantapan-ketahanan-pangan-nasional>. di unduh pada tanggal 08 Agustus 2011 pada pukul 22.30 wib).
- Husodo, Siswono Yudo. 2002. Membangun Kemandirian di Bidang Pangan untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. Makalah dalam Repimnas Kadin Indonesia, 27-28 Februari, Jakarta.
- Hutagalung, M. 2007. Dampak Peningkatan Harga Beras Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Pada Beberapa Strata Luas Lahan. Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Marhaeni, 2011. Analisis Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Industri Kecil Tegel di Kecamatan Pederungun Periode 2004 – 2008. Studi Kasus Usaha Manufaktur. Program Serjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Mardianto,S. 2001. Mungkinkah Konsumsi Beras Turun?. Kompas, 3 Juli, halaman 15.
- Mardikanto, T. 1994. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian , Sebelas Maret. University Prees. Surakarta.
- Prihartono, 2009. Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan. Departemen Pertanian. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor.
- Saragih,B. 2001. Suara dari Bogor Membangun Sistem Agribisnis, PT. Loji Grafika Griya Sarana, Jakarta.
- Saragih,B. 2010. Suara Agribisnis. Kumpulan pemikiran suara agribisnis. PT. Permata Wacana Lestari. Jakarta
- Sembiring, Surya Abdi. 2011. Analisis Ekonomi Terhadap Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Perberasan Tahun 2005 – 2008. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sibuea P., Berdaulatkah Indonesia atas Pangan ?. Harian Kompas ! 16 Januari 2007.
- Simatupang, Pantjar. 2000. Anatomi Masalah Produksi Beras Nasional dan Upaya Mengatasinya. Makalah dalam Seminar Nasional, Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan. Bogor. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Soekartawi. 2010. Agribisnis Teori dan Aplikasinya.PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Subiyekto. 1993. Agribisnis Berbasis Padi Sawah, PT. Loji Grafika Griya Sarana, Jakarta.
- Sudiyono, A 2001. Pemasaran Pertanian. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang(UMM Press). Malang.
- Suganda H. Betulkah Kita Surplus Beras ?, Harian Kompas 30 Januari 2006.

- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, Achmad. 2002. *Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional: Sebuah pengantar Dalam Suryana. Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Penerbit LPEM-UI, Jakarta
- Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, 2001. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. LPEM. FE UI, Jakarta.
- Tomek, W.E and L Robinson. 1990. *Agricultural Product Prices, Second Edition* Cornell University Press, Ithaca.
- Tambunan, 2003. *Beberapa Isu Penting Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) IX, 2008. *Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi Untuk Mencapai Mellenium Development Goal's*. Hotel Bumi Karsa Bidakara, 26-27 Agustus 2008, Jakarta.



Lampiran 1. Tujuan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di Kabupaten Asahan.

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) memiliki beberapa tujuan diantaranya ;

- a. Memberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok, sehingga mampu untuk : (i) mengembangkan sarana penyimpanan (gudang), (ii) melakukan pembelian gabah/beras dan atau pangan pokok lokal spesifik lainnya bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi musim paceklik, dan (iii) melakukan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya sehingga harga pangan di tingkat petani saat panen raya stabil.
- b. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah dengan : (i) meningkatkan volume pembelian gabah/beras/jagung, (ii) meningkatkan volume penjualan gabah/beras/jagung sehingga modal usaha Gapoktan meningkat, dan (iii) meningkatkan nilai tambah produk melalui kegiatan penyimpanan / pengolahan / pengepakan.
- c. Memperluas jejaring kerjasama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya.